

LOKAKARYA

PENGABDIAN PADA MASYARAKAT LPM IPB  
DAN PENYUSUNAN PROGRAM KEGIATAN DENGAN  
PEMERINTAH DAERAH KERJASAMA  
BOGOR, 13-14 JANUARI 1993

LOK-PPM.II

PENGALAMAN KERJASAMA LPM IPB DENGAN  
PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH

Oleh :

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR



LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

1993

# PENGALAMAN KERJASAMA LPM IPB DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH<sup>1)</sup>

Oleh :

Sjafri Mangkuprawira<sup>2)</sup>  
Maman Suryaman<sup>3)</sup>

## I. PENDAHULUAN

Keikutsertaan perguruan tinggi dalam pembangunan pada dasarnya tidak lepas dari kerangka pengembangan pendidikan tinggi itu sendiri. Oleh karena itu LPM IPB sejak dibentuknya sebagai lembaga yang mengkoordinasikan kegiatan darma pengabdian oleh IPB, memandang perlu mengadakan hubungan kerjasama dengan beberapa Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Tingkat II dalam berbagai program pembangunan wilayah.

Hal di atas telah diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990 tentang pendidikan tinggi yang tercantum pada pasal 2. Perguruan tinggi disamping dituntut untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik, juga perlu mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional.

Adapun arah kebijaksanaan program pembangunan yang digariskan GBHN yaitu merupakan landasan penerapan konsep pengembangan wilayah terpadu dalam memecahkan masalah perbedaan laju pertumbuhan dan ketidakmerataan hasil pengembangan

- 
- 1) Makalah disampaikan pada Lokakarya Pengabdian Pada Masyarakat LPM IPB dan Penyusunan Program Kegiatan dengan Pemerintah Daerah Kerjasama, di LPM IPB Bogor, tanggal 13-14 Januari 1993.
  - 2) Ketua LPM IPB
  - 3) Kepala Sub Bagian Program LPM IPB

antar daerah. Sedangkan proses pembangunan pada dasarnya upaya menciptakan kesejahteraan manusia bukan hanya menyangkut pemanfaatan sumberdaya tetapi juga pembinaan dan peningkatan yang menyangkut proses penentuan keputusan perencanaan pembangunan.

Dengan demikian program pembangunan oleh LPM IPB secara lebih terarah dan terpadu sejak tahun 1988 dilaksanakan melalui bidang-bidang dan jenis program PPM yang dikembangkan yaitu melalui :

- 1) Program hubungan kerjasama
- 2) Program pendidikan pada masyarakat
- 3) Program pelayanan pada masyarakat
- 4) Program pengembangan wilayah pedesaan dan kaji tindak, serta
- 5) Program kuliah kerja nyata

## II. TUJUAN

Berdasarkan bidang-bidang kegiatan PPM oleh LPM IPB, maka dapat dirumuskan tujuan LPM IPB bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam pembangunan sebagai berikut:

### U M U M

Terwujudnya hubungan kerjasama dengan pemerintah daerah agar tercapainya koordinasi dan konsultasi program yang efektif dan timbal balik

### KHUSUS

1. Ikut serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pelaku pembangunan daerah, khususnya para perencana, pelaksana dan mempersiapkan calon kader pembangunan daerah masing-masing

2. Adanya tukar menukar pengalaman dalam pembangunan wilayah
3. Membantu menyusun konsep perencanaan pembangunan wilayah secara terpadu
4. Ikut serta menggerakkan perencanaan pembangunan wilayah secara terpadu
5. Membantu pemerintah daerah dalam mempercepat gerak pembangunan

### III. BENTUK-BENTUK DAN HASIL KERJASAMA

#### 3.1. Hubungan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah

Beberapa pemerintah daerah yang melakukan kerjasama dengan LPM IPB sampai akhir tahun 1992 ialah 7 (tujuh) Pemerintah Daerah Tingkat II dan 5 (lima) Pemerintah Daerah Tingkat I. Kerjasama dengan pemerintah daerah DT II di Jawa barat masing-masing Kabupaten Bogor, Sukabumi, Sumedang, Cirebon dan Karawang dan Kabupaten Banjarmegara di Jawa Tengah telah dituangkan dalam Piagam ++Kerjasama. Sementara itu dalam 2 (dua) kabupaten di Jawa Barat masing-masing Kabupaten DT II Bogor dan Kabupaten Pandeglang walau kerjasama tersebut telah terjalin namun belum dituangkan dalam Piagam Kerjasama. Demikian halnya pula dengan Pemda DKI Jakarta.

Penanganan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam piagam kerjasama jelas menuntut pengisian kerjasama yang lebih terkoordinasi, untuk itu masing-masing telah ditunjuk berdasarkan SK Rektor koordinator kerjasama di kabupaten/kodya yang bersangkutan dari staf dosen yang terpilih.

Pengisian kerjasama pada dasarnya berdasarkan pada kepentingan dan kebutuhan masing-masing yang dilaksanakan melalui program rutin LPM IPB seperti KKN IPB serta program

pembangunan yang didasarkan atas kebutuhan pemerintah daerah maupun masyarakat. Jenis-jenis kegiatan yang dikerjasamakan, fakultas yang terlibat dan sumber dana kegiatan dapat dilihat pada Tabel lampiran.

### 3.2. Program-Program Kerjasama

#### a. *Kuliah Kerja Nyata (KKN)*

Kuliah Kerja Nyata merupakan program rutin IPB yang tujuannya disamping dalam rangka pendidikan juga membantu pemerintah dalam mempercepat gerak pembangunan masyarakat. Kegiatan ini dalam setiap tahun dilaksanakan 2 kali, masing-masing periode bulan Februari - Maret dan periode bulan Juli - Agustus. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini kegiatan KKN IPB diselenggarakan sekaligus dalam mengisi kerjasama dengan Kabupaten/Kotamadya kerjasama.

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa pelaksanaan KKN yang hanya 2 bulan lebih banyak memberikan proses pendidikan dan pengalaman bagi para mahasiswa. Namun demikian tidak sedikit hasil-hasil KKN memberikan masukan pada Pemda dan IPB pada khususnya berupa informasi kebutuhan dan permasalahan daerah untuk diisi dengan program pembangunan lainnya oleh Pemda dan IPB, baik dalam bentuk program pasca KKN maupun program-program pengembangan wilayah, kaji tindak dan lainnya.

#### b. *Bidang Pendidikan dan Pelatihan*

Pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan merupakan unsur penting pembangunan. Oleh karena itu LPM IPB melalui pusat pendidikan dan pelatihan telah menyelenggarakan kegiatan pembangunan di bidang tersebut di beberapa wilayah kerjasama. Dalam kurun empat tahun terakhir ini antara lain telah diselenggarakan :

1. Pengembangan Sumberdaya Keluarga Tani Melalui Pengembangan Usaha Ternak Domba dan Ayam Buras.

2. Pembinaan Kelompok Tani Melalui Pengembangan Lahan Kering
3. Pelatihan Pengembangan Desa Terpadu.
4. Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan.
5. Pelatihan dasar-dasar perkoperasian bagi kader-kader PKK
6. Pengkajian dan pengembangan intervensi proyek makanan jajanan.
7. Pelatihan nasional penghijauan dan pertamanan Kota.
8. Pelatihan Komputer untuk analisis data.

Program-program pendidikan dan pelatihan di atas, berdasarkan pengalaman menunjukkan bahwa materi-materi pendidikan dan pelatihan tersebut benar-benar merupakan kebutuhan untuk kepentingan pembangunan wilayah di daerah-daerah kerjasama. Namun keterbatasan sumber dana sering menjadi hambatan untuk dilakukannya kegiatan monitoring dan pengembangan pasca latihan. Oleh karena itu program-program pendidikan dan pelatihan semacam perlu dikembangkan diseluruh pemerintah daerah kerjasama dan terus dikaji model-model pengembangannya termasuk sistim monitoring dan pasca latihannya.

#### *c. Program Pelayanan pada Masyarakat*

Program pelayanan pada masyarakat oleh LPM IPB pada dasarnya bentuk lain dalam pengamalan IPTEK dibidang pertanian pada khususnya baik melalui penyebaran informasi, pelayanan langsung pada masyarakat. Jenis-jenis kegiatan yang ada relevansinya dengan pembangunan wilayah antara lain:

1. penerbitan warta pengabdian dan buku tentang IPTEK.
2. Partisipasi dalam pameran Pembangunan HAPSAK Pancasila.
3. Pasca KKN IPB.
4. Pelayanan kesehatan hewan melalui pengoperasian klinik hewan keliling.
5. Pembinaan dan pengembangan usaha domba dan ayam buras.

Program penyebaran informasi selama ini masih lebih banyak informasi sepihak dari IPB. Diharapkan dimasa datang adanya arus balik informasi dari pemerintah daerah, sehingga terjalinnya tukar menukar informasi dan pengalaman. Adapun kegiatan partisipasi dalam pameran pembangunan Hapsak pancasila yang secara rutin diselenggarakan oleh pemerintah daerah selama ini baru terbatas partisipasinya di Kabupaten dan Kotamadya Bogor. Keterbatasan sumber dana jelas masih belum memungkinkan untuk berpartisipasi dalam pameran-pameran pembangunan di Kabupaten kerjasama lainnya.

Sedangkan pelayanan langsung pada kesehatan hewan keliling akhir-akhir ini dipadukan dengan pembinaan kelembagaan baik kelembagaan usaha dalam rangka pasca KKN di daerah-daerah lokasi, seperti yang sedang berlangsung di Desa Leuwisadeng Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor serta Kecamatan Jagakarsa Pemda DKI Jakarta.

Pengalaman menunjukkan bahwa pelayanan informasi melalui pameran maupun langsung di masyarakat pedesaan melalui pasca KKN merupakan kebutuhan dalam kerangka pembangunan wilayah. Oleh karena itu LPM IPB akan terus mengembangkannya dan diharapkan dapat lebih dikerjasamakan dengan pemerintah daerah.

#### *d. Program Pengembangan Wilayah*

Program pengembangan wilayah oleh LPM IPB dan Pemda Kerjasama bertujuan secara bersama-sama menyusun konsep perencanaan pembangunan wilayah serta bersama-sama pula merumuskan konsep pengembangan wilayah terpadu. Kegiatan pengembangan wilayah tersebut di atas terletak pada tiga program utama yaitu :

1. Perencanaan
2. Uji coba dan kaji tindak
3. Income Generating

Dalam kurun lima tahun terakhir ini beberapa program pengembangan wilayah yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan wilayah, adalah :

1. Pengembangan parawisata Alam Gunung Salak Kabupaten DT II Bogor
2. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan produktivitas lahan kering Kabupaten DT II Sukabumi yang kemudian dilanjutkan dengan pengembangan wilayah pedesaan terpadu.
3. Kaji tindak perencanaan pengembangan wilayah di propinsi Jawa Barat.
4. Konsep pengembangan wisata agro kabupaten Bekasi
5. Analisis data wilayah untuk penyusunan pola dasar dan Repelita VI Kabupaten DT II Cirebon.
6. Evaluasi dan penyusunan pola dasar dan Repelita VI Kotamadya DT II Bogor.
7. Pengembangan desa-desa lingkaran kampus IPB Darmaga.

Program-program yang berbentuk perencanaan seperti pengembangan parawisata Gunung Salak dan konsep pengembangan agrowisata di Bekasi, penyusunan Repelita hasilnya masih belum diketahui yang hal ini jelas diperlukan kerjasama berikutnya. Sementara itu dalam pengembangan wilayah yang berbentuk kaji tindak seperti pengembangan wilayah lahan kering di Kabupaten Sukabumi hasil-hasil yang dapat diketahui adalah peningkatan produktivitas lahan, pola tanam yang menunjukkan hasil optimal, perubahan sikap petani, dan lain-lain.

#### IV. PERMASALAHAN DAN HARAPAN

Dari uraian kegiatan kerjasama dengan pemerintah daerah selama ini ada beberapa yang perlu dipertanyakan; apakah



persyaratan kerjasama selama ini sudah dipenuhi, baik bentuk program, personal, komunikasi timbal balik maupun kelembagaannya. Pada kenyataannya beberapa program masih belum terencana secara terintegrasi dan terarah.

Oleh karena itu diharapkan dapat disusun program secara bersama-sama seperti:

1. Proyek pembinaan tingkat Kecamatan dan Desa melalui Kecamatan dan Desa contoh atau lainnya melalui action research.
2. Pengembangan sistim dan sumber pendanaan
3. Diskusi atau seminar-seminar untuk menghasilkan konsep-konsep pembangunan wilayah dll.
4. Tukar menukar informasi.
5. Pengembangan sumberdaya manusia melalui pelatihan-pelatihan perencanaan pembangunan wilayah.

## V. KESIMPULAN

1. Program pembangunan daerah oleh LPM IPB pada dasarnya merupakan kegiatan yang tidak lepas dari pengembangan IPB sendiri. Oleh karena itu IPB dibawah koordinasi LPM telah berupaya melaksanakan PPM dalam rangka pembangunan wilayah, melalui peningkatan kelembagaan hubungan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Tingkat II.
2. Beberapa peningkatan program pembangunan yang dikerjakasikan antara IPB dengan Pemerintah Daerah adalah:
  - a. Peningkatan dan pemanfaatan kegiatan KKN sebagai media pengidentifikasi dan analisis kebutuhan, masalah dan potensi sumberdaya wilayah.
  - b. Peningkatan dan kerjasama pengembangan sumberdaya para pelaku pembangunan melalui pelatihan-pelatihan
  - c. Peningkatan dan kerjasama pengembangan tukar-menukar dan pelayanan informasi

- d. Peningkatan dan kerjasama pengembangan wilayah berupa perencanaan, uji coba dan kaji tindak, penerapan teknologi tepat guna, dll.
3. Permasalahan di bidang kelembagaan hubungan kerjasama yang harus ditingkatkan adalah personil, sistim dan sumber pendanaan, pengisian kerjasama berupa kegiatan-kegiatan yang lebih berhasil guna untuk IPB dan untuk Pemerintah Daerah sendiri.
4. Beberapa harapan LPM-IPB dalam mengisi kerjasama dengan pemerintah daerah dalam pembangunan daerah antara lain berupa proyek-proyek kegiatan pembinaan kecamatan dan desa contoh, diskusi atau seminar untuk menghasilkan konsep-konsep pembangunan, dll.

Tabel Lampiran

**DAFTAR KEGIATAN PEMBANGUNAN WILAYAH  
KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH**

No.	Jenis Kegiatan	Pemerintah Daerah Kerjasama	Fakultas yang Terlibat	Sumber Dana
1.	Pengembangan Pariwisata Alam Gunung Salak	Pemda Kab. Bogor	- Faperta - Fahutan	Pemda Kabupaten DT II Bogor
2.	Pemantauan Pelaksanaan Hasil Pembangunan Desa Terpadu di Kecamatan Parung Panjang	sda	- Faperta - Fahutan - F K H	sda
3.	Pelatihan Pengembangan Kelembagaan Desa terpadu di Desa Tapos Parung Panjang	sda	- Faperta - Fahutan - F K H	sda
4.	Pelaksanaan KKN IPB	- Semua Kabupaten kerjasama - DKI Jaya - Kabupaten/Kodya lainnya di Jabar	- Semua Fakultas di IPB	- IPB - Pemda
5.	Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pening- katan Produktivitas Lahan Kering	Pemda Kabupaten DT II Sukabumi	- Faperta - Fapet - F K H - Fahutan - Fateta	Pemda Kabupaten DT II Sukabumi
6.	Kaji Tindak Perencanaan Pengembangan Wilayah	- Pemda Propinsi Tingkat I Jawa Barat	- Faperta - F K H - faperta	Pemda Kabupaten DT I Sukabumi
7.	Pembinaan Pengolahan Penangkapan Ikan Tra- disionil	- Pemda Kabupaten DT II Sukabumi	- Faperta - faperikan	IPB
8.	Pengembangan Produktivitas Usaha Sapi Perah Cisarua Bogor Melalui Perbaikan Managemen dan Pakan Ternak	- Pemda Kabupaten DT II Bogor	- F K H - Fapet	IPB
9.	Konsep Pegembangan Wisata Agro Kabupaten Sukabumi	- Pemda Kabupaten Bekasi	- Faperta - Fapet - Fahutan	Pemda Kabupaten Bekasi
10.	Pengembangan Wilayah Pertanian Terpadu di Kecamatan Sagaranten Sukabumi	- Pemda kabupaten Sukabumi	- Faperta - Fapet - F K H - Fahutan	IPB

No.	Jenis Kegiatan	Pemerintah Daerah Kerjasama	Fakultas yang Terlibat	Sumber Dana
11.	Pelatihan Penghijauan dan Pertamanan Kota	- Pemda Kabupaten Se Indonesia - Dan lain-lain Instansi	- Faperta	Peserta
12.	Pameran Pembangunan Hapsak Pancasila	- Pemda Kabupaten dan Kodya Bogor	- Semua Fakultas di IPB	IPB
13.	Pelatihan Dasar-Dasar Perkoperasian PKK Tingkat Kecamatan	- Pemda Kabupaten DT II Sukabumi	- Faperta	- Pemda Kabupaten - IPB
14.	Pelatihan Aplikasi Komputer Untuk Analisis Data	- Pemda kabupaten Kerjasama	- FMIPA - Faperta	IPB
15.	Pembinaan dan Pengembangan di Desa Lingkar kampus	- Pemda Kab. Bogor	- Semua Fakultas dan IPB	IPB
16.	Introduksi Ayam Buras dan Pertanian Terpadu	- Kab. DT II Bogor	- F K H - Fapet - Faperta	IPB
17.	Pembinaan Kelompok Masyarakat melalui pemeliharaan Ayam Buras	- Pemda DKI Jaya	- F K H - Fapet	Pemda DKI Jaya
18.	Pengembangan Desa Pantai di Cisolok	- Pemda Kabupaten Sukabumi	- Faperta - Faperikan	IPB
19.	Analisis Data Untuk Penyusunan pola Dasar Pembangunan dan Repelita VI Kabupaten DT II Cirebon	- Pemda Kabupaten Cirebon	- Faperta - Faperikan - Fapet - F K H	Pemda Kabupaten DT II Cirebon
20.	Penyusunan Pola Dasar Pembangunan dan Repelita VI	- Kodya Bogor	- Faperta - Fapet - Faperikan - F K H	Pemda Kodya Bogor
21.	Intervensi Makanan Jajanan	- Pemda Kodya Bogor	- Faperta - Fateta	IPB Pemerintah Belanda Pemda Kodya Bogor DIKTI DEPDIKBUD